



KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS: STUDI KASUS PROVINSI PAPUA SELATAN

**Novia Eka Ardani^{1*}, Muhammad Adri Ramadhan², Yakoba Faleria
Ome Yanengga³, Umiyati Haris⁴**

¹²³⁴Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Musamus Merauke
Email* : noviaeka211104@gmail.com

Received: 03-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 17-06-2025

Abstract

The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.

Keywords: *Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency*

Abstrak

Pembentukan Provinsi Papua Selatan merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan Pembangunan yang terjadi di Papua. Penelitian ini mengkaji peran berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemekaran daerah dengan menggunakan kajian pustaka kualitatif. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pendekatan yang melibatkan partisipasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengelolaan anggaran yang transparan. Saran yang diberikan meliputi pemekaran secara bertahap dan pembentukan dewan pengawas independen. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang otonomi daerah dengan menggabungkan perspektif berbagai aktor yang terlibat.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Ketimpangan Pembangunan, Peran Pemangku Kepentingan, Hak Masyarakat Adat, Transparansi Anggaran*

PENDAHULUAN

Permasalahan pemekaran Papua Selatan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan bersumber dari berbagai permasalahan yang mendasar dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Papua selatan yang sebagian wilayahnya berada di pedalaman, menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan

kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 85% wilayahnya berada di daerah terpencil, sehingga akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik dan transportasi masih sangat terbatas (B. P. S. Papua, 2023).

Kondisi infrastruktur transportasi di Papua Selatan sangat memprihatinkan. Jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, sehingga membuat keterisolasian wilayah dan kesulitan dalam penyaluran kebutuhan dasar. Hal ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh pelayanan publik (Bappenas, 2020). Keterbatasan akses ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah tersebut. Dalam sektor kesehatan, warga di wilayah terpencil seperti Naukenjerai harus menempuh perjalanan selama delapan jam untuk sampai ke pusat kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai, banyak pusat kesehatan tidak memiliki dokter tetap dan mengalami keterbatasan obat-obatan penting. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang serius dalam layanan akses kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat setempat (RMOL, 2023).

Dalam sektor pendidikan, angka putus sekolah di beberapa daerah terpencil cukup tinggi (Thalib & Haris, 2023). Situasi ini disebabkan oleh minimnya sarana pendidikan dan jarak yang terlalu jauh bagi anak-anak untuk menjangkau pendidikan dasar dan menengah. Kendala-kendala ini menghambat kemajuan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan jangka panjang di Papua Selatan (Jaga, 2023).

Selain itu konflik sosial terkait tanah adat semakin meningkat. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 15 kasus sengketa antara masyarakat adat dengan berbagai pihak yang menimbulkan ketegangan dan instabilitas sosial (Lubis, 2024), (Komnas, 2022). Perwakilan politik masyarakat adat dalam lembaga legislatif di Papua masih sangat terbatas. Keadaan ini mengakibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat sering tidak mendapatkan tempat yang layak dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam (Elisabeth et al., 2020).

Angka kemiskinan di Papua Selatan yang mencapai 28,5% menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia (Indonesia, 2022). Ketimpangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan intervensi yang tepat dan berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan (Haris, Oja, et al., 2025).

Evaluasi terhadap pemekaran enam provinsi baru di Papua, termasuk Papua Selatan menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai langkah percepatan pembangunan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dari masyarakat adat yang aspirasinya belum terwakili sepenuhnya. Meski begitu,

pemerintah menegaskan bahwa pemekaran ini merupakan hasil aspirasi tokoh adat dan kepala daerah yang disampaikan langsung kepada Presiden (Koibur, 2024).

Kajian tentang kesiapan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru menilai Provinsi ini mampu mengelola pemerintahannya secara mandiri. Namun, muncul kritik terkait potensi dominasi kelompok tertentu dan menyempitnya ruang aspirasi masyarakat adat jika pengelolaannya tidak dilakukan secara inklusif (politica,2023). Selain itu, penelitian tentang pusat pertumbuhan dan keseimbangan wilayah mencatat Kabupaten Merauke sebagai pusat pertumbuhan potensial dengan fasilitas lengkap, sedangkan Kabupaten Boven Digoel unggul secara geografis sebagai pusat pertumbuhan yang strategis (BPK Perwakilan Provinsi Papua, 2023), (Digoel, 2017).

Pembentukan Provinsi Papua Selatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk perluasan wilayah ini sebagai bagian dari otonomi khusus Papua yang menekankan pentingnya pengawasan agar pertumbuhan Provinsi baru sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan hak masyarakat adat (Midhol, 2022). Penelitian lain menyoroti pentingnya pembentukan daerah otonomi khusus Papua Selatan berdasarkan dimensi politik, teknis administratif, dan ketimpangan daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan publik (Midhol, 2022).

Secara normatif, perluasan Papua Selatan bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat demokrasi lokal. Selain itu, diharapkan perluasan ini juga dapat membantu rekonsiliasi, menyelesaikan konflik, dan menjaga hak asasi manusia masyarakat adat Papua (Sutiyo et al., 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai masalah mendasar pada kebutuhan akan perluasan Provinsi Papua Selatan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan menyamakan kesejahteraan di daerah ini. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti infrastruktur yang terbatas, akses terhadap layanan publik, konflik sosial dan ketidakselarasan ekonomi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mengingat kondisi Papua Selatan yang masih tertinggal dan rentan terhadap konflik sosial serta ketidakadilan, perluasan wilayah diharapkan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah, memperkuat representasi masyarakat adat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen digital. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber online, seperti artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan topik pengembangan Provinsi Papua Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan tinjauan literatur yang sistematis. Peneliti mengumpulkan data dari sumber digital yang kredibel, termasuk portal pemerintah, Lembaga penelitian, dan publikasi ilmiah yang dapat diakses secara online. Data yang dikumpulkan mencakup statistik, laporan Pembangunan, kebijakan perluasan wilayah, dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis tentang masalah dan urgensi pengembangan Papua Selatan.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa narasi, deskripsi, dan analisis teks, serta data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari statistik resmi dan laporan pemerintah. Sumber data terdiri dari data primer digital yang tersedia di situs resmi dan data sekunder dari publikasi akademik serta media terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan analisis tematik, di mana data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis mencakup penemuan pola, hubungan, dan memahami arti dari data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang lengkap dan tepat. Validasi data dijaga dengan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan literatur yang berbeda.

PEMBAHASAN

Para Pelaku dalam Proses Kebijakan

Proses pembentukan Provinsi Papua Selatan melibatkan banyak pihak yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat berfungsi sebagai pembuat kebijakan utama, menetapkan kerangka makro dan memberikan dasar hukum untuk pembentukan provinsi baru (Haris, Adam, et al., 2025). Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan regulasi teknis yang mengatur standar minimum untuk infrastruktur dan sumber daya manusia yang harus dipenuhi sebelum pembentukan provinsi baru. Regulasi ini mengharuskan adanya sekurang-kurangnya 10 pegawai negeri sipil (ASN) yang kompeten untuk setiap bidang serta pengembangan infrastruktur dasar (Permendagri, 2023). Pendekatan ini didasarkan pada evaluasi yang menunjukkan bahwa sekitar 80% dari perluasan wilayah sebelumnya mengalami kegagalan akibat tidak cukupnya kesiapan sumber daya manusia (Siregar et al., 2024).

Namun, kebijakan pemerintah pusat kerap mengalami tantangan dalam menyesuaikan dengan kondisi lokal yang khas di Papua Selatan. Lanskap geografis dan sosio kultural yang beragam membutuhkan strategi adaptif yang melampaui kebijakan nasional yang standar. Sebagai contoh, persyaratan infrastruktur harus memperhitungkan medan yang luas dan sulit, sementara pengembangan sumber daya manusia harus peka terhadap kapasitas dan tradisi lokal. Oleh karena itu meskipun pemerintah pusat menyediakan kerangka umum, sangat penting untuk memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian lokal (Sutiyo et al., 2024).

Di tingkat regional, Pemerintah Kabupaten Merauke, yang telah ditunjuk sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan cukup besar dalam mempersiapkan transisi pemerintahan. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas menjadi hambatan utama pembangunan di Papua Selatan (Haris & Oja, 2024), sehingga pemerintah daerah dan pusat berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program dan regulasi khusus, terutama untuk mendukung orang asli Papua (Suara, 2025). Selain itu kesenjangan pembangunan antar distrik mengancam kohesi sosial, sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat untuk mencegah kecemburuan sosial dan konflik. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun rencana pembangunan daerah yang komprehensif dan realistis, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan antar wilayah serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan alokasi anggaran yang terarah (P. P. Papua, 2023).

Komunitas adat Papua Selatan sebagai pemegang hak adat yang sah, menuntut pengakuan dan perlindungan atas wilayah adat mereka yang kerap tumpang tindih dengan batas administrasi baru. Konflik berkepanjangan yang muncul diperparah oleh bentrokan antara kepemilikan tanah adat dan regulasi nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak masyarakat adat (Provinsi, 2024), (News, 2025), (Sutiyo et al., 2024). Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat adat menuntut agar pemerintah daerah dan pusat segera melakukan pengukuhan wilayah adat secara resmi serta memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, guna mencegah konflik dan memastikan perlindungan hak-hak adat secara berkelanjutan (Makuba, 2024), (W. Papua, 2025).

Media lokal dan nasional memiliki peranan penting sebagai penyebar informasi dan pengawas dalam proses pembentukan Provinsi Papua Selatan. Jurnalisme investigasi telah mengungkap ketidakcocokan dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek, yang telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan akuntabilitas publik. Namun, menjaga objektivitas tetap menjadi tantangan di tengah keberagaman kepentingan politik (Haris, 2023). Untuk mencegah kebocoran dana dan meningkatkan keterlibatan publik, maka pembuatan portal pemantauan anggaran secara langsung yang dapat diakses oleh masyarakat adalah langkah untuk meningkatkan transparansi (Pemerintah, Daerah Kabupaten, 2024), (Kementerian, 2025), (Inspektorat, Provinsi, 2023),

Pemimpin agama memiliki posisi yang sangat dihormati dalam masyarakat dan sering dianggap sebagai sosok yang berwenang dalam menyelesaikan beragam masalah sosial, terutama saat-saat transisi seperti ketika provinsi baru dibentuk. Di Papua Selatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah serta suara yang menjaga kerukunan antar umat

beragama, dengan aktif mengangkat kearifan lokal dan budaya daerah dalam setiap kegiatan dakwah dan sosial. MUI Papua Selatan juga berfungsi sebagai mediator untuk meredakan potensi ketegangan sosial yang terjadi, sembari membantu dalam menyebarkan informasi mengenai pembentukan provinsi dengan pendekatan yang menghormati budaya dan norma lokal. Melalui kegiatan keagamaan, ceramah dan acara sosial, MUI mendukung pendidikan multikultural, menanamkan toleransi, dan menciptakan harmoni di masyarakat yang sangat diperlukan untuk menghindari konflik horizontal serta memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di tengah latar belakang masyarakat yang beragam. Kerja sama antara MUI Papua Selatan dan pemerintah daerah yang diungkapkan oleh Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, memperkuat posisi ulama dalam mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memperkuat aspek keagamaan dan sosial di Papua Selatan. Musyawarah daerah I (Musda) MUI Papua Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2005 menjadi titik penting untuk memperkuat fungsi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang baik. Pada kesempatan tersebut, Ketua MUI Pusat, K.H. Muhammad Cholil Nafis menekankan bahwa MUI seharusnya berfungsi sebagai payung besar bagi umat Islam yang mengakomodasi kepentingan mereka dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang sejalan dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Dengan adanya keberadaan MUI di Papua Selatan diharapkan dapat menjadi sumber perdamaian dan sikap moderat dalam beragama, menjaga keseimbangan sosial di tengah keberagaman suku dan agama yang beragam di Papua Selatan (Cendrawasih, 2025), (Metro, 2025), (MUI, 2025).

Aktivis hak asasi manusia (HAM) secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi proses transisi pemerintahan serta pengembangan wilayah baru, termasuk di Papua Selatan untuk memastikan bahwa hak dasar setiap individu, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat, dihormati dan dilindungi dari marginalisasi. Di Papua Selatan, berbagai laporan menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengusiran paksa dan kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan strategis yang memperburuk kondisi sosial masyarakat adat. Aktivis HAM dan lembaga-lembaga terkait terus berjuang untuk pembentukan mekanisme pemantauan independen yang dapat mengawasi proses pembangunan dan pengambilan keputusan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemantauan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama periode transisi administrasi serta memastikan partisipasi masyarakat adat di setiap tahap kebijakan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Selatan dalam memahami hak asasi manusia juga dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat setempat. Dengan demikian, peran aktivis hak asasi manusia dan lembaga pemantau di

Papua Selatan sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam proses transisi dan pembangunan (Jubi, 2025), (Pemerintah, Daerah, Kabupaten, 2025), (W. Papua, 2025).

Partai politik memandang pembentukan Provinsi Papua Selatan sebagai kesempatan strategis untuk memperluas pengaruh mereka dan memperkuat posisi politik di tingkat regional. Provinsi yang baru saja didirikan ini, dengan ibu kota di Kabupaten Merauke menjadi ajang penting bagi partai lokal dan nasional untuk meningkatkan representasi mereka dalam lembaga legislatif daerah. Dalam konteks ini, partai-partai telah mengusulkan penambahan jumlah kursi legislatif agar tersedia lebih banyak ruang untuk kader mereka, serta membentuk tim transisi yang melibatkan tokoh dan kader partai guna memperkuat basis politik menjelang pemilihan umum di Provinsi Papua Selatan. Proses pengembangan Papua Selatan yang telah diperjuangkan sejak tahun 2022 dan secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 pada Juli 2022 telah membuka peluang politik yang signifikan, terutama mengingat keberagaman suku dan budaya masyarakat adat Anim Ha di Papua Selatan. Selain aspek politik, pembentukan provinsi ini juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang merupakan perhatian utama partai-partai politik dalam merumuskan strategi pengaruh mereka. Dengan demikian, pembentukan Provinsi Papua Selatan tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga merupakan arena yang intens untuk perjuangan pengaruh politik di antara partai-partai yang bersaing (Pemerintah, Daerah Kabupaten, 2024), (Wikipedia, 2025), (DPR, 2025).

Organisasi Non Pemerintah (LSM) di Papua Selatan memiliki peran penting sebagai pengawas yang bertindak independen untuk memastikan adanya transparansi, partisipasi aktif dari masyarakat, dan keberlanjutan dalam setiap tahap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah. LSM tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga secara aktif memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya yang kerap menghadapi marginalisasi dalam proses pembangunan. Salah satu langkah penting yang mereka dorong adalah pelaksanaan audit sosial terhadap penggunaan anggaran publik, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam konteks Papua Selatan, transparansi dalam pengelolaan anggaran yang tercermin dalam dokumen APBD dan laporan pengelolaan dana otonomi khusus, menjadi prioritas utama bagi LSM dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pembentukan forum pengawasan independen yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil sangat dianjurkan sebagai mekanisme untuk menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga keharmonisan

sosial di tengah keberagaman budaya dan kepentingan. Dengan demikian, kerja sama antara LSM dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Selatan (Pemerintah Kota Medan, 2018), (Manibuy & Teturan, 2025), (B. P. Papua, 2022),

Sektor swasta menganggap pembentukan Provinsi Papua Selatan sebagai peluang investasi yang sangat menarik, terutama dalam bidang infrastruktur, pertambangan, dan agroindustri. Investasi dalam skala besar mulai direalisasikan, seperti pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol di Merauke dengan nilai investasi sekitar 83,27 triliun. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku bisnis dalam pengembangan industri ini, termasuk pembuatan pusat pelatihan sumber daya manusia agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam proyek tersebut. Selain itu, sektor pertambangan juga menjadi fokus utama, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah, namun perusahaan-perusahaan menekankan pentingnya kepastian hukum, stabilitas sosial, dan regulasi yang mendukung untuk menghindari konflik dengan komunitas adat setempat. Usulan strategis yang diajukan meliputi penyederhanaan proses perizinan usaha dan penguatan kemitraan dengan komunitas adat untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga keharmonisan sosial di Papua Selatan (Tempo, 2024), (Sarjan Lahay, 2024), (Antara, 2024).

Tabel 1: Analisis Peran dan Tuntutan Para Aktor dalam Proses Kebijakan

| Aktor | Peran dan Kontribusi | Tuntutan Utama |
|--------------------------------------|--|---|
| Pemerintah Pusat | Menetapkan kebijakan, regulasi ASN dan infrastruktur, serta dasar hukum. | Minimal 10 ASN kompeten setiap bidang, pengembangan infrastruktur dasar, fleksibilitas kebijakan. |
| Pemerintah Kabupaten Merauke (Pemda) | Mengelola administrasi lokal dan peningkatan kapasitas ASN di wilayahnya. | Fokus pada 3 distrik, peningkatan kapasitas ASN, pengurangan kesenjangan sosial antar distrik. |
| Komunitas Adat | Memiliki hak adat, memperjuangkan pengakuan dan perlindungan wilayah adat. | Penguatan wilayah adat resmi, ruang partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. |
| Media | Menyebarkan informasi dan mengawasi pelaksanaan anggaran. | Portal pemantauan anggaran real time yang dapat diakses masyarakat. |
| Tokoh Agama | Menjaga kerukunan sosial dan mempromosikan pendidikan multikultural. | Promosi pendidikan multikultural, pencegahan konflik sosial, penguatan toleransi. |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Aktivis Hak Asasi Manusia | Mengawasi perlindungan HAM dan mendukung kapasitas ASN terkait HAM. | Pembentukan gugus tugas HAM independen, perlindungan hak masyarakat adat. |
| Partai Politik | Memperluas representasi politik dan membentuk tim transisi. | Penambahan kursi DPRD, pembentukan tim transisi partai. |
| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | Mengawal transparansi, partisipasi masyarakat, dan audit sosial anggaran. | Pembentukan forum pengawasan independen, pelaksanaan audit sosial anggaran. |
| Sektor Swasta | Mengembangkan investasi dan bermitra dengan komunitas adat. | Penyederhanaan perizinan, kemitraan dengan komunitas adat, kepastian hukum dan stabilitas sosial. |

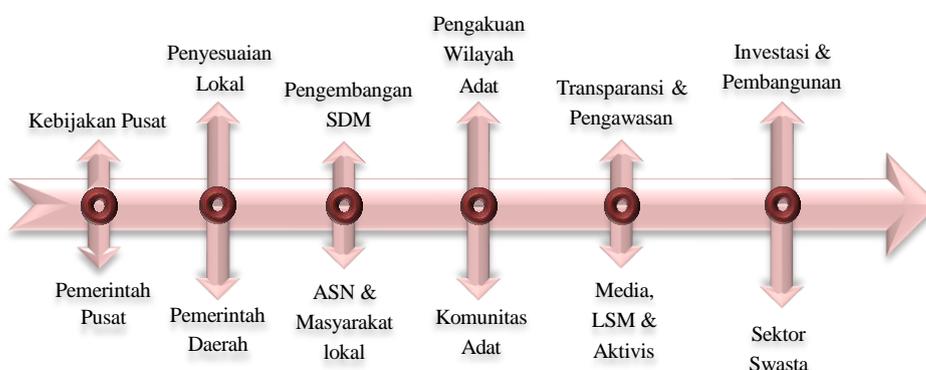


Diagram 1: Proses dan Aktor Kunci dalam Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Hasil analisis mengungkapkan bahwa berbagai aktor utama memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembentukan Provinsi Papua Selatan. Pemerintah pusat dan daerah mengatur kebijakan dan kapasitas ASN, komunitas adat menuntut pengakuan wilayah, media serta LSM berperan dalam transparansi dan pengawasan, dan sektor swasta mendukung investasi serta kemitraan. Sinergi antara aktor-aktor ini tercermin dalam proses kebijakan, penyesuaian lokal, pengembangan sumber daya manusia, pengakuan terhadap wilayah adat, transparansi, dan pembangunan.

Analisis ini menjelaskan bagaimana peran dan kontribusi berbagai aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas adat, media, LSM, dan sektor swasta saling berinteraksi dalam pembentukan Provinsi Papua Selatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ainaqo, Handayani, dan Mardiansyah 2024 yang membahas kolaborasi dalam pengembangan daerah pedesaan Margomarem di Kabupaten Wonosobo. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan

pengembangan daerah pedesaan sangat tergantung pada kolaborasi multi aktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas secara sinergis. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup aspek transparansi dan pengawasan publik yang merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan pengembangan (Ainaqo et al.,2024).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan melibatkan berbagai aktor kunci yang berperan penting dalam pengembangan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengakuan wilayah adat, transparansi, dan pembangunan daerah. Meskipun pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan standar minimal, penyesuaian terhadap kondisi geografis dan sosial budaya lokal sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah, komunitas adat, media, tokoh agama, aktivis hak asasi manusia, partai politik, LSM, dan sektor swasta secara sinergis berkontribusi dalam proses pembentukan provinsi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar koordinasi antara para aktor ditingkatkan dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik lokal Papua Selatan. Pengakuan resmi terhadap wilayah adat dan keterlibatan aktif komunitas adat dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah konflik sosial. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya ASN lokal harus tetap di perkuat. Memperkuat peran tokoh agama dan lembaga pengawas independen juga sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan akuntabilitas pemerintah di provinsi yang baru dibentuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2024). Jhonlin Grup Siap Bangun Infrastruktur Proyek Cetak Sawah di Merauke.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, 313.
- BPK Perwakilan Provinsi Papua. (2023). Kabupaten Mimika | BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- Cendrawasih, P. (2025). Wagub papsel Abdul Gebze Pimpin MUI Papua Selatan.
- Digoel, B. (2017). BAB I.
- DPR, R. (2025). DPR RI Komisi II Dorong Percepat Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Papua Selatan.
- Elisabeth, M., Bonay, S., Hukum, F., Udayana, U., Wairocana, I. G. N., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). Sistem Rekrutmen Politik Otonomi Khusus Papu. *Jurnal Kertha Negara*, 8(10), 60–69.
- Haris, U. (2023). Etika Politik Dalam Pemanfaatan Ruang Publik. , 2(1. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 9–18.
- Haris, U., Adam, A., Saputro, E., & Mardiana, W. O. (2025). Memahami Teori Politik: Sebuah Pengantar. *Literasi Indonesia*.
- Haris, U., & Oja, H. (2024). Ekonomi Politik dan Pembangunan Sosial di Kota Merauke: Analisis Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(2), 482–491.
- Haris, U., Oja, H., & Tambajong, H. (2025). Analisis Dilema Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Kerangka Teori Keynesian. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 14(1), 123–132. <https://doi.org/10.35724/sjias.v14i1.6933>
- Indonesia, P. P. R. (2022). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Inspektorat, Provinsi, P. S. (2023). Pantau Perkembangan Dob Bpkp Monev Papua Selatan.
- Jaga, I. (2023). Angka Putus Sekolah di Papua Capai Ratusan Ribu, 553 Guru di Kabupaten Ini Kerap Tak Berada di Tempat Tugas.
- Jubi, P. (2025). Komnas HAM: PSN Di Merauke Berpotensi Langgar HAM. Kementerian, K. R. I. (2025). Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Papua Selatan. 1–3.
- Koibur, S. (2024). Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat Papua. 5(10), 3914–3922.
- Komnas, H. A. M. (2022). Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2022.
- Lubis, T. M. (2024). Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*, 5(337), 1–12.
- Makuba, N. (2024). Masyarakat Adat di Papua Selatan Menderita Akibat Proyek Strategis Nasional.
- Manibuy, M. M., & Teturan, Y. E. (2025). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Anggaran Dalam Meningkatkan Penyerapan Dana Otonomi Khusus Papua. 7(2), 282–290.

- Metro, M. (2025). Kepengurusan MUI Papua Selatan Segera Terbentuk.
- Midhol, A. B. (2022). ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022 Analysis of the Urgency of Forming a Special Autonomous Region in South Papua Province in 2022 Abstrak.
- MUI, D. (2025). Dakwah Islam, Peran MUI, dan Kehangatan Masyarakat Bumi Cenderawasih. In Mui.or.Id (Issue 51).
- News, B. I. (2025). Masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak Proyek Strategis Nasional.
- Papua, B. P. (2022). Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (pp. 1–23).
- Papua, B. P. S. (2023). Pertambangan dan Energi.
- Papua, P. P. (2023). Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan.
- Papua, W. (2025). KemenHAM Segera Sikapi Rekomendasi dari KOMNAS HAM dan Tuntutan Masyarakat Adat Menolak PSN-Papua.
- Pemerintah, Daerah Kabupaten, M. (2024). Pj Gubernur Papua Selatan Serahkan Dipa 2025 Dan Daftar Alokasi Tkd Ta 2025.
- Pemerintah, Daerah, Kabupaten, M. (2025). Kementerian Ham Gandeng Pemprov Papua Selatan Gelar Diseminasi Penguatan Ham Bagi Asn.
- Pemerintah Kota Medan, M. (2018). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. In Perda (Issue 6, pp. 1–11).
- Permendagri. (2023). PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 1–146.
- Provinsi, P. P. S. (2024). MRP Papua Selatan: Mengurai Konflik Kebun Plasma dengan Mediasi dan Dialog.
- RMOL, P. (2023). Sekilas Tentang Distrik Korkari Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke.
- Sarjan Lahay. (2024). Jutaan Hektar jadi Kebun Tebu, Was-was Nasib Orang Papua. In Mongabay sittus berita lingkungan.
- Siregar, T. E. S., Ayu, A. P., Lia, L. U. M. P., & Novi, N. W. (2024). Komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah (Studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.59>
- Suara, M. (2025). Panja Komisi II DPR RI Evaluasi Percepatan Pembangunan DOB Papua Selatan.
- Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi Adat Dan Pemerintahan Di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 91–99. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064>
- Tempo. (2024). Pemerintah Bangun 5 Pabrik Gula dan Bioetanol di Merauke, Total Investasi Rp84,27 Triliun.
- Thalib, N., & Haris, U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 76–84.

Wikipedia. (2025). Papua Selatan Anim Ha.